

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia pada saat ini mencerminkan adanya respon rakyat yang sangat tinggi akan meningkatnya permintaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Salah satu yang menjadi sorotan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah terciptanya transparansi pengelolaan keuangan di organisasi-organisasi yang ada di dalam pemerintahan. Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya menurut Silver dalam (Sinarwati *et al.*, 2015)

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tahun 2001 dan peraturan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dalam UU No. 32 tahun 2004, menjelaskan bahwa definisi dari otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Tujuan utama dengan adanya otonomi daerah adalah untuk tercapainya *Good Corporate Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, dan salah satu upaya untuk mewujudkan *good Corporate governance* adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Dimana pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah menurut Mardiasmo dalam (Fardan, 2013).

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik, ekonomi, pemerintah dan keputusannya. Transparansi mungkin semua

stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintah, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban periode yang lalu. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Noprizal, 2017).

Penerapan Transparansi adalah cara mendapatkan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja menurut (Fitrianto,2015).

Beberapa daerah telah menerbitkan Perda terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah ini masih sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana (Sinarwati *etc*, 2015)

Fenomena transparansi keuangan daerah Di Indonesia masih sangat minim sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, yang berakibatkan menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada tahun 2012, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi tinggi, yaitu dengan CPI (*Corruption Perceptions Index*) sebesar 3,0 (dengan kisaran 0-10) (Transparency.org). Hal ini dapat dijadikan salah satu gambaran bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di Indonesia masih sangat rendah.

Kasus yang terjadi pada pelaporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mendapat penghargaan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) secara

berturut-turut tiga tahun terakhir ini dalam pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI04/10/2016). Laporan Keuangan Kota Bandar Lampung TA. 2015 telah mendapat proses audit yang mendalam pada beberapa tahapan auditing. Penyajian laporan keuangan tersebut telah diupayakan secara optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," ujarnya. (sumber : www.bpkgo.id).

Sedangkan menurut LSM KOMPAK Bandar Lampung, (MN) Dugaan Demi Dugaan Penyelewengan Terus Bergulir Di Tubuh Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Setelah Adanya Dugaan Penyelewengan Jabatan, Kini Tim Investigasi LSM KOMPAK “ Menggoyang “ Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dengan Menemukan Data Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Menyatakan Bahwa Ada Dana Uang Operasional Yang Di Pindahkan Dari Rekening Bendahara Dinas Tata Kota Bandar Lampung Ke Rekening Pribadi Milik Sekertaris Dinas Tata Kota Bandar Lampung. “Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015 No.25A/LHP/XVIII.BLP/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016 Terdapat Indikasi Kadistako Bandar Lampung Melakukan Persetujuan Dan Pemiaran Saat Dana Uang Operasional Dari Rekening Bendahara Pengeluaran Ke Rekening Pribadi Milik Sekertaris Distako Bandar Lampung.” Tutur Sofyan, Sekjen LSM KOMPAK Saat Di Konfirmasi Via HP Pada Selasa, 20 Desember 2016 Lalu. LSM KOMPAK Menduga, Ada Unsur Tindak Kecurangan Akibat Terjadinya Penyimpangan Tersebut. Dan Mereka Berharap Agar Ada Penyelidikan Lebih Lanjut Atas Hasil Laporan Keuangan Pemkot Bandar Lampung Tersebut.(<http://medianusantaranews.com>).

Dari pernyataan diatas terjadi ketidaksinkronan antara opini BPK RI Kota Bandar Lampung dengan LSM KOMPAK Kota Bandar Lampung tahun 2016 dimana opini WTP yang diraih oleh pemerintah kota Bandar Lampung berbanding terbalik dengan LSM KOMPAK yang menyatakan “Menemukan Data Hasil

Pemeriksaan BPK RI Yang Menyatakan Bahwa Ada Dana Uang Operasional Yang Di Pindahkan Dari Rekening Bendahara Dinas Tata Kota Bandar Lampung Ke Rekening Pribadi Milik Sekertaris Dinas Tata Kota Bandar Lampung” seharusnya apabila opini BPK RI yang memberikan WTP tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah agar lembaga atau dinas dibawah naungnya bisa bersikap transparan terhadap masyarakat luas sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menarik diteliti sejauh mana transparansi yang ada di Kota Bandar Lampung ini sudah diterapkan secara menyeluruh atau masih hanya bersifat legalitas / formalitas saja saat pemeriksaan yang dilakukan lembaga pemerintah itu sendiri.

Tekanan Eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktikpraktik yang dimaksud dalam penelitian ini di khususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan menurut Ridha, dan Basuki dalam (Putra,2016).

Komitmen manajemen sendiri terkait dengan profesionalisme. Perubahan komitmen dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi. Strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat (Masruro Dan Praptoyo,2015)

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian profesionalisme. Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No 46A

Tahun 2007). Tugas pengadministrasian tersebut sebelumnya telah digariskan lewat Undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang telah disusun baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun secara bersama. Dalam proses menjalankan suatu kebijakan, birokrasi-birokrasi negara tidaklah steril dari lingkungan politik suatu negara (Fardian,2013).

Saat ini masih belum banyak penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan, khususnya Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktor - faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sinarwati *etc* 2015) yang meneliti tentang Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Karangasem dengan hasil Bahwa Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, dan Tekanan Eksternal dan Faktor Politik tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi laporan keuangan. Oleh sebab itu peneliti mereplikasi dari penelitian (Sinarwati,2015) dengan perbedaan sampel penelitian dan menambah satu variabel Sumber Daya Manusia untuk membedakan dan menguji seberapa jauh pengaruhnya terhadap transparansi pelaporan keuangan, Sumber Daya Manusia di pemerintahan saat ini mengalami perubahan standart yang mengharuskan pendidikan dan kemampuan menjadi andalan dalam menciptakan hasil kinerja yang baik di pemerintahan itu sendiri dan penelitian ini diambil sampel pada SKPD Kota Bandar Lampung (Fardian,2013)..

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Komitmen Manajemen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh faktor politik terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang akan dibahas tidak meluas, terarah dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor - faktor yang diteliti yang diperkirakan mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah tekanan eksternal, faktor politik, komitmen manajemen dan kompetensi sumber daya manusia dan SKPD yang akan di jadikan sampel mengambil pada SKPD Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
2. Untuk menguji secara empiris faktor politik terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
3. Untuk menguji secara empiris komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

4. Untuk menguji secara empiris kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan khususnya dibidang transparansi pelaporan keuangan.
2. Bagi Akademisi
Sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk memahami pentingnya transparansi pelaporan keuangan.
3. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung
Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran serta temuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan serta dapat menjadi masukan dalam peningkatan transparansi pelaporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan dan penyusunannya, laporan pada penelitian atau skripsi ini akan menggunakan kerangka sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan atas penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang uraian teoritis mengenai teori transparansi laporan keuangan, peraturan dan faktor-faktornya, selain itu juga dimuat penelitian-

penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang dirancang untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sumber data, populasi dan sample, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, metode analisis data. Selanjutnya, peneliti akan menuliskan metode penelitian yang dipakai beserta perincian jenis-jenis data yang digunakan untuk melihat transparansi laporan keuangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan menganalisis hasil penelitian tersebut dengan uji pengaruh serta uraian kesimpulan uji yang didapat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kumpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang ada, dan saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN